

# Struktur Sosial Kesultanan Palembang Darussalam Periode 1600-1825

Metrahultikultura<sup>1</sup>✉, Ahmad Falah<sup>2</sup>

(1,2) MAN 1 Boyolali, Indonesia

**Abstrak:** Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam penting di Sumatra Selatan yang berkembang sejak abad ke-17 hingga awal abad ke-19. Keberlangsungan kesultanan ini tidak terlepas dari struktur sosial yang tersusun secara hierarkis dan berfungsi sebagai dasar pengaturan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam pada periode 1600-1825 dengan menelaah lapisan-lapisan sosial serta peran masing-masing kelompok dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam terdiri atas sultan dan keluarga bangsawan sebagai elite penguasa, elite birokrasi kerajaan, ulama, pedagang, rakyat biasa, serta kelompok budak. Setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda namun saling terkait dalam menopang stabilitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Struktur sosial tersebut mencerminkan perpaduan antara tradisi feudal Melayu dan nilai-nilai Islam yang memberikan legitimasi terhadap kekuasaan sultan. Namun, intervensi kolonial Belanda secara bertahap melemahkan tatanan sosial tradisional dan berkontribusi terhadap runtuhnya kesultanan pada tahun 1825.

**Abstract:** The Palembang Darussalam Sultanate was one of the major Islamic polities in South Sumatra that developed from the seventeenth to the early nineteenth century. The continuity of this sultanate was closely linked to a hierarchical social structure that functioned as the foundation of political, economic, and social life. This study aims to examine the social structure of the Palembang Darussalam Sultanate during the period 1600-1825 by identifying social strata and analyzing the roles of each group within governance and society. The research employs a historical method with a qualitative approach through a literature review of relevant primary and secondary sources. The findings indicate that the social structure of the Palembang Darussalam Sultanate consisted of the sultan and noble families as the ruling elite, the royal bureaucratic elite, ulama, merchants, commoners, and slaves. Each social group performed distinct yet interconnected roles that supported governmental stability and social order. This social structure reflected the integration of Malay feudal traditions and Islamic values, which provided religious legitimacy to the authority of the sultan. However, increasing Dutch colonial intervention gradually weakened the traditional social order and contributed to the collapse of the Palembang Darussalam Sultanate in 1825.

## Article history:

Received: 07 May 2023

Revised: 19 July 2023

Accepted: 11 July 2023

Published: 20 August 2023

## Kata kunci:

struktur sosial, Kesultanan Palembang Darussalam, sejarah sosial

## Keyword:

social structure, Palembang Darussalam Sultanate, social history

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



**How to cite:** Metrahultikultura, M., & Falah, A. (2023). Struktur Sosial Kesultanan Palembang Darussalam Periode 1600-1825. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v1i1.343>

## PENDAHULUAN

Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam yang memiliki posisi penting dalam sejarah sosial dan politik Sumatra Selatan sejak abad ke-17 hingga awal abad ke-19. Keberadaan kesultanan ini tidak hanya ditandai oleh kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga oleh terbentuknya struktur sosial yang terorganisasi secara hierarkis. Struktur sosial tersebut berfungsi

sebagai kerangka utama dalam mengatur relasi kekuasaan, pembagian peran sosial, serta legitimasi pemerintahan dalam masyarakat kerajaan (Andaya, 1993; Arviansyah, 2021).

Struktur sosial dalam Kesultanan Palembang Darussalam tersusun atas beberapa lapisan yang memiliki kedudukan dan fungsi berbeda. Lapisan tertinggi ditempati oleh sultan dan keluarga bangsawan sebagai elite penguasa, diikuti oleh elite birokrasi kerajaan, ulama, pedagang, rakyat biasa, hingga kelompok budak. Pembagian lapisan ini mencerminkan sistem sosial feodal yang berkembang dalam tradisi kerajaan Melayu Islam, di mana status sosial ditentukan oleh garis keturunan, kedekatan dengan pusat kekuasaan, serta peran dalam struktur pemerintahan (Andaya, 1993; Kartodirdjo, 1992).

Dalam konteks masyarakat kerajaan, struktur sosial tidak hanya berfungsi sebagai sistem klasifikasi sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian politik dan sosial. Struktur ini menentukan akses terhadap kekuasaan, distribusi sumber daya ekonomi, serta posisi simbolik dalam kehidupan masyarakat. Sultan sebagai pemimpin tertinggi memiliki otoritas politik dan religius, sementara kelompok elite di bawahnya berperan sebagai pelaksana kebijakan dan penghubung antara istana dan masyarakat (Kartodirdjo, 1992; Ricklefs, 2008).

Pembentukan struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam tidak dapat dilepaskan dari proses Islamisasi yang berlangsung di wilayah Sumatra Selatan. Islam berperan sebagai landasan normatif dalam pembentukan sistem hukum, tata pemerintahan, dan kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai Islam berpadu dengan adat istiadat Melayu dan membentuk tatanan sosial yang khas, di mana kekuasaan sultan memperoleh legitimasi religius melalui peran ulama dan institusi keagamaan (Yani, 2014; Gazali, 2016).

Pada periode 1600–1825, Kesultanan Palembang Darussalam mengalami dinamika sosial yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, kesultanan berupaya memperkuat konsolidasi kekuasaan melalui pengaturan birokrasi dan penguatan hubungan antara elite istana dan kelompok masyarakat lainnya. Dari sisi eksternal, meningkatnya intervensi kekuatan kolonial Eropa membawa perubahan signifikan terhadap tatanan politik dan sosial kesultanan (Ricklefs, 2008; Andaya, 1997).

Letak geografis Palembang yang strategis di jalur perdagangan Sungai Musi turut membentuk struktur sosial masyarakatnya. Aktivitas perdagangan menjadi salah satu penopang utama perekonomian kesultanan dan melahirkan kelompok pedagang yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Meskipun secara hierarkis berada di bawah bangsawan, pedagang memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan dan menjadi bagian penting dalam hubungan antara kesultanan dan jaringan perdagangan regional maupun internasional (Farida, 2009; Farida et al., 2019).

Struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam juga memperlihatkan pola hubungan patron dan klien yang kuat. Sultan dan bangsawan bertindak sebagai patron yang memberikan perlindungan politik dan ekonomi, sementara kelompok di bawahnya menunjukkan loyalitas sebagai bentuk timbal balik. Pola ini memperkuat dominasi elite penguasa sekaligus menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat kerajaan (Andaya, 1993; Komaruddin & Syukri, 2023).

Peran ulama dalam struktur sosial kesultanan menempati posisi strategis. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berperan dalam pendidikan, hukum Islam, dan legitimasi kekuasaan. Hubungan antara umara dan ulama mencerminkan keseimbangan antara otoritas politik dan otoritas religius dalam kehidupan masyarakat Palembang (Gazali, 2016; Yani, 2014).

Pada lapisan bawah struktur sosial, rakyat biasa dan kelompok budak menjadi penopang utama kehidupan ekonomi kesultanan. Rakyat biasa, yang terdiri atas petani, nelayan, dan pengrajin, memiliki kewajiban ekonomi dan sosial terhadap kesultanan. Sementara itu, kelompok budak, yang berasal dari tawanan perang atau perdagangan budak, menjadi bagian dari sistem kerja yang mendukung kehidupan elite istana dan bangsawan. Keberadaan kelompok ini mencerminkan karakter feodal masyarakat kerajaan pada masa tersebut (Andaya, 1993; Arviansyah, 2021).

Tekanan kolonial Belanda pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 membawa dampak besar terhadap struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam. Intervensi kolonial tidak hanya melemahkan kekuasaan politik sultan, tetapi juga mengganggu tatanan sosial tradisional yang telah terbangun. Perubahan ini berkontribusi terhadap runtuhnya kesultanan pada tahun 1825 dan menandai berakhirnya sistem sosial kerajaan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Palembang (Ricklefs, 2008; Andaya, 1997).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam pada periode 1600–1825 secara sistematis dan mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi lapisan sosial serta peran masing-masing kelompok dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Pendekatan sejarah sosial digunakan untuk memahami struktur sosial sebagai bagian integral dari dinamika sejarah kesultanan, bukan sebagai kategori statis semata (Kartodirdjo, 1992).

Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme kerja struktur sosial dalam menopang kekuasaan dan kehidupan masyarakat Kesultanan Palembang Darussalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi kajian sejarah sosial Nusantara, khususnya dalam memahami hubungan antara kekuasaan politik, legitimasi keagamaan, dan dinamika sosial dalam kerajaan-kerajaan Islam di Sumatra Selatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk merekonstruksi dan menganalisis struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam pada periode 1600–1825 secara sistematis dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, peran sosial, serta relasi kekuasaan antar kelompok masyarakat dalam konteks sejarah, bukan pada pengukuran kuantitatif.

Tahapan penelitian sejarah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang relevan, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer meliputi arsip kolonial, catatan perjalanan, serta dokumen sejarah yang berkaitan dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku sejarah, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang membahas sejarah sosial, politik, dan ekonomi Palembang serta kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

Tahap berikutnya adalah kritik sumber, yang terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber, sedangkan kritik internal bertujuan untuk menguji keakuratan isi sumber serta relevansinya dengan fokus penelitian. Proses ini penting

untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selanjutnya, data yang telah melalui proses kritik dianalisis pada tahap interpretasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data sejarah untuk memahami struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam, termasuk pembagian lapisan sosial, peran masing-masing kelompok, serta hubungan sosial yang terbentuk di antara mereka. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan keterkaitan antara struktur sosial, sistem pemerintahan, dan dinamika sosial pada masa tersebut.

Tahap akhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan kronologis. Melalui tahap ini, temuan penelitian disajikan secara runut dan argumentatif agar dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam pada periode 1600–1825. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam kajian sejarah sosial Nusantara, khususnya mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Sumatra.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam pada periode 1600–1825 tersusun secara hierarkis dan berfungsi sebagai kerangka utama dalam pengaturan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Struktur sosial ini tidak bersifat statis, tetapi berkembang seiring dengan dinamika internal kesultanan dan pengaruh eksternal, khususnya intervensi kolonial Eropa. Pembentukan dan keberlangsungan struktur sosial tersebut mencerminkan perpaduan antara tradisi feodal Melayu dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan norma sosial masyarakat Palembang (Andaya, 1993; Kartodirdjo, 1992).

Secara umum, struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam terdiri atas beberapa lapisan yang memiliki fungsi dan peran berbeda namun saling terkait. Lapisan-lapisan tersebut meliputi sultan dan keluarga bangsawan sebagai elite penguasa, elite birokrasi kerajaan, ulama, pedagang, rakyat biasa, serta kelompok budak. Pembagian ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial yang jelas, di mana kedudukan seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh faktor keturunan, kedekatan dengan pusat kekuasaan, serta peran dalam sistem pemerintahan dan ekonomi kesultanan (Arviansyah, 2021; Andaya, 1997).

Lapisan sosial tertinggi ditempati oleh sultan beserta keluarga bangsawan. Sultan berperan sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas politik, administratif, dan religius. Kekuasaan sultan tidak hanya bersumber dari kekuatan politik, tetapi juga dari legitimasi adat dan agama. Dalam konteks masyarakat Melayu Islam, sultan dipandang sebagai pemegang amanah Tuhan yang bertugas menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Posisi ini menjadikan sultan sebagai pusat kekuasaan sekaligus simbol kesatuan masyarakat kesultanan (Ricklefs, 2008; Ade Tunggal et al., 2024).

Keluarga bangsawan, yang terdiri atas pangeran dan kerabat istana, memiliki kedudukan istimewa dalam struktur sosial. Mereka memperoleh akses langsung terhadap jabatan strategis dalam pemerintahan serta berbagai hak ekonomi dan sosial. Kedudukan bangsawan tidak hanya memperkuat dominasi elite istana, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pewarisan kekuasaan dan stabilitas politik. Sistem kekerabatan dan penggunaan gelar kebangsawan menjadi instrumen penting dalam mempertahankan hierarki sosial dan legitimasi elite penguasa (Sari, 2015; Komaruddin & Syukri, 2023).

Di bawah lapisan bangsawan terdapat elite birokrasi kerajaan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan sultan. Kelompok ini mencakup pejabat-pejabat seperti patih, wazir, penghulu, serta aparatur administrasi lainnya. Elite birokrasi memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan, mengelola wilayah, memungut pajak, serta menegakkan hukum adat dan hukum Islam. Jabatan birokrasi umumnya diberikan kepada individu yang memiliki loyalitas tinggi terhadap sultan atau memiliki hubungan kekerabatan dengan elite istana, sehingga memperkuat kontrol politik pusat terhadap wilayah kesultanan (Kartodirdjo, 1992; Mail, 2008).

Peran elite birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan politik. Mereka menjadi penghubung antara istana dan masyarakat, serta berperan dalam menjaga stabilitas sosial melalui penerapan kebijakan dan pengawasan terhadap kelompok masyarakat bawah. Keberadaan elite birokrasi memperlihatkan bahwa struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam dibangun di atas sistem patronase yang kuat, di mana loyalitas dan kedekatan dengan pusat kekuasaan menjadi faktor utama dalam mobilitas sosial (Andaya, 1993; Arviansyah, 2021).

Ulama menempati posisi strategis dalam struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam. Mereka berperan dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan hukum Islam, serta sering kali menjadi penasihat sultan dalam pengambilan keputusan penting. Keberadaan ulama memberikan legitimasi religius terhadap kebijakan politik kesultanan dan memperkuat posisi Islam sebagai dasar kehidupan sosial masyarakat. Hubungan antara umara dan ulama mencerminkan keseimbangan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam (Gazali, 2016; Yani, 2014).

Dalam praktiknya, ulama memiliki pengaruh yang luas, tidak hanya di lingkungan istana tetapi juga di tingkat masyarakat. Mereka berperan sebagai pendidik, pemimpin ritual keagamaan, dan penafsir norma-norma Islam yang mengatur kehidupan sosial. Peran ini menjadikan ulama sebagai aktor penting dalam pembentukan moral sosial dan legitimasi struktur sosial yang ada. Dengan demikian, struktur sosial kesultanan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga religius dan normatif (Iskandar & Wasisto, 2020; Zaelani & Fadlan, 2023).

Kelompok pedagang dan saudagar menempati lapisan sosial yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan ekonomi Kesultanan Palembang Darussalam. Letak Palembang yang strategis di jalur perdagangan Sungai Musi menjadikan aktivitas perdagangan sebagai salah satu penopang utama perekonomian kesultanan. Pedagang lokal dan asing terlibat dalam perdagangan hasil bumi, komoditas maritim, serta barang-barang impor yang menghubungkan Palembang dengan jaringan perdagangan regional dan internasional (Farida, 2009; Farida et al., 2019).

Meskipun secara hierarkis berada di bawah bangsawan dan elite birokrasi, pedagang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar. Kekuatan ini memungkinkan mereka memperoleh perlindungan dari kesultanan dan, dalam beberapa kasus, memengaruhi kebijakan ekonomi kerajaan. Hubungan antara sultan dan pedagang bersifat saling menguntungkan, di mana kesultanan memperoleh pemasukan ekonomi, sementara pedagang mendapatkan keamanan dan legitimasi dalam menjalankan aktivitasnya (Ricklefs, 2008; Jumhari, 2024).

Rakyat biasa merupakan kelompok terbesar dalam struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam. Kelompok ini terdiri atas petani, nelayan, pengrajin, dan pekerja lainnya yang berperan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Rakyat biasa memiliki kewajiban membayar pajak, menyerahkan sebagian hasil produksi, serta memberikan tenaga kerja kepada kesultanan. Meskipun berada pada lapisan sosial bawah, peran mereka sangat menentukan keberlangsungan sistem ekonomi dan sosial kesultanan (Kartodirdjo, 1992; Farida, 2009).

Dalam kehidupan sehari-hari, rakyat biasa berada di bawah pengawasan elite birokrasi dan bangsawan. Namun, mereka juga terikat dalam jaringan sosial dan ekonomi yang memungkinkan terjadinya interaksi timbal balik antara kelompok masyarakat. Struktur sosial yang hierarkis tidak sepenuhnya menutup ruang interaksi, tetapi tetap menempatkan rakyat biasa dalam posisi subordinat yang bergantung pada kebijakan dan perlindungan elite penguasa (Andaya, 1993; Rochmiatun, 2016).

Lapisan sosial terbawah ditempati oleh kelompok budak. Budak berasal dari tawanan perang, perdagangan budak, atau individu yang kehilangan kebebasan karena faktor ekonomi dan sosial. Budak bekerja di lingkungan istana, rumah bangsawan, serta sektor ekonomi lainnya. Keberadaan sistem perbudakan mencerminkan karakter feudal masyarakat kerajaan dan menunjukkan ketimpangan sosial yang tajam dalam struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam (Andaya, 1993; Arviansyah, 2021).

Meskipun memiliki kedudukan sosial paling rendah, budak tetap menjadi bagian integral dari sistem sosial dan ekonomi kesultanan. Tenaga kerja budak mendukung kehidupan elite dan berkontribusi terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi. Keberadaan mereka memperlihatkan bahwa struktur sosial kesultanan dibangun di atas relasi kekuasaan yang tidak seimbang, namun tetap terorganisasi dalam kerangka sistem sosial kerajaan (Rudyansjah, 2014).

Secara keseluruhan, struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam menunjukkan keterkaitan erat antara kekuasaan politik, legitimasi religius, dan aktivitas ekonomi. Hubungan antarlapisan sosial bersifat hierarkis, tetapi juga saling bergantung. Sultan dan elite penguasa membutuhkan dukungan ulama, pedagang, dan rakyat biasa untuk mempertahankan kekuasaan, sementara kelompok masyarakat bawah bergantung pada perlindungan dan kebijakan elite istana (Kartodirdjo, 1992; Andaya, 1997).

Tekanan kolonial Belanda pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 secara bertahap melemahkan struktur sosial tradisional ini. Intervensi kolonial mengurangi otoritas sultan, mengubah pola hubungan ekonomi, serta mengganggu keseimbangan sosial yang telah terbentuk. Proses ini berkontribusi terhadap runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1825 dan menandai transformasi besar dalam tatanan sosial masyarakat Palembang (Ricklefs, 2008; Elake et al., 2021).

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam merupakan sistem yang kompleks, hierarkis, dan saling terkait. Struktur ini berperan penting dalam menopang keberlangsungan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat hingga awal abad ke-19. Analisis terhadap struktur sosial tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kekuasaan, peran sosial, dan relasi antarkelompok dalam konteks sejarah kerajaan Islam di Nusantara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam pada periode 1600–1825 tersusun secara hierarkis dan berfungsi sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Struktur sosial tersebut mencerminkan perpaduan antara tradisi feudal Melayu dan nilai-nilai Islam yang memberikan legitimasi religius terhadap kekuasaan sultan sebagai pemimpin tertinggi kesultanan. Struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam terdiri atas beberapa lapisan, yaitu sultan dan keluarga bangsawan sebagai elite penguasa, elite birokrasi kerajaan, ulama, pedagang, rakyat biasa, serta kelompok budak. Setiap lapisan memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan dalam menopang keberlangsungan

sistem pemerintahan dan kehidupan sosial. Hubungan antarlapisan sosial menunjukkan adanya ketergantungan antara kekuasaan politik, otoritas keagamaan, dan aktivitas ekonomi. Keberadaan struktur sosial yang terorganisasi tersebut mampu menciptakan stabilitas sosial dalam jangka waktu yang relatif panjang. Namun, tekanan eksternal dari kekuatan kolonial Belanda secara bertahap melemahkan sistem sosial tradisional kesultanan. Intervensi kolonial tidak hanya berdampak pada runtuhnya kekuasaan politik Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1825, tetapi juga mengubah tatanan sosial masyarakat yang sebelumnya berlandaskan pada sistem kerajaan. Dengan demikian, kajian mengenai struktur sosial Kesultanan Palembang Darussalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dalam kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kajian sejarah sosial dan pendidikan sejarah, khususnya dalam memahami hubungan antara kekuasaan, agama, dan masyarakat dalam konteks sejarah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Tunggal, A., Halim, B., & Syawaludin, M. (2024). Sultan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam: Perannya terhadap Kesultanan Palembang Darussalam. *Tanjak: Journal of History and Civilization*, 4(2). <https://doi.org/10.19109/tanjak.v4i2.23920>
- Andaya, B. W. (1993). *To live as brothers*. University of Hawai'i Press.
- Andaya, B. W. (1997). Adapting to political and economic change: Palembang in the late eighteenth and early nineteenth centuries. In *Political change in Southeast Asia* (pp. 185–210). Palgrave Macmillan. [https://doi.org/10.1007/978-1-349-25760-7\\_8](https://doi.org/10.1007/978-1-349-25760-7_8)
- Arviansyah, M. R. (2021). Struktur sosial dan pemerintahan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 3(2). <https://doi.org/10.31540/sindang.v3i2.1195>
- Darmawan, C. (2023). Warisan monumental peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam yang terakulturasi. *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1). <https://doi.org/10.19109/yonetim.v4i1.9145>
- Elake, G. L., Ferdiansyah, R., & Handoko, A. I. (2021). Kebangkitan adat di era otonomi daerah: Studi kasus Kesultanan Palembang Darussalam. *Mimbar Budaya Indonesia*, 15(10). <https://doi.org/10.33758/MBI.V15I10.1080>
- Farida, F. (2009). Perekonomian Kesultanan Palembang. *Lontar: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 6(1). <https://doi.org/10.21009/LONTAR.061.02>
- Farida, I., Rochmiatun, E., & Kalsum, N. U. (2019). Peran Sungai Musi dalam perkembangan peradaban Islam di Palembang: Dari masa kesultanan sampai Hindia-Belanda. *Jurnal Ushuluddin dan Studi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.30829/JUSPI.V3I1.4079>
- Gazali, G. (2016). Hubungan umara dan ulama dalam membentuk kehidupan sosio-religius di Aceh Darussalam masa Sultan Iskandar Muda. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 16, 173–185. <https://doi.org/10.30641/DEJURE.2016.V16.173-185>
- Iskandar, F. A., & Wasisto, J. (2020). Eksistensi perpustakaan masa Kesultanan Palembang Darussalam dalam perspektif ahli. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 4(3), 383–393. <https://doi.org/10.14710/anuva.4.3.383-393>

- Jumhari, J. (2024). Rakit yang terombang-ambing: Ambivalensi sikap politik dan orientasi ekonomi orang Cina di Palembang pada masa revolusi. *Jurnal Antropologi Sosial*, 14(1). <https://doi.org/10.25077/jas.v14i1.120>
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Gramedia.
- Komaruddin, K., & Syukri, A. (2023). Defragmentasi budaya politik aristokrat Melayu: Studi terhadap manuskrip sejarah Palembang. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 6(1). <https://doi.org/10.35961/perada.v6i1.877>
- Mail, H. A. A. bin H. (2008). Institusi wazir, ceteria dan menteri pada abad ke-19: Struktur dan kuasa elite dalam pentadbiran di Kesultanan Melayu Brunei. *Sosiohumanika*, 1(1). <https://doi.org/10.2121/SOSIOHUMANIKA.V1I1.329>
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200–2008*. Serambi.
- Rochmiatun, E. (2016). Orang laut, bajak laut, dan raja laut: Dinamika kehidupan dan kekuasaan dalam naskah kontrak Sultan-sultan Palembang abad ke-18–19. *Manuskripta*, 6(1). <https://doi.org/10.33656/MANUSKRIPTA.V6I1.75>
- Roswandi, Y., Napitupulu, E., & Ginting, M. (2024). Menelusuri jejak-jejak peninggalan Islam di Sumatera Utara abad ke-13 hingga ke-20 dalam perspektif sejarah dan sosial. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/edukasi.v2i1.1022>
- Rudyansjah, T. (2014). Kaomu, papara, dan walaka: Kajian struktur sosial dan ideologi kekuasaan di Kesultanan Wolio. *Antropologi Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/AI.V0I52.3315>
- Sari, F. (2015). Sistem kekerabatan sosial masyarakat dalam penggunaan gelar kebangsawan “Yang” dan “Abang” di Kota Muntok Kepulauan Bangka (1734–1816). *Jurnal Cendekia*, 4(2). <https://doi.org/10.36706/JC.V4I2.4782>
- Sholeh, K. (2016). Kafilah dagang Muslim dan peranan maritim Kerajaan Sriwijaya di Palembang pada abad VII–IX Masehi. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 1(1). <https://doi.org/10.31851/KALPATARU.V1I1.531>
- Yani, Z. (2014). *Tarekat Sammaniyyah di Palembang*. Palembang: Penerbit Akademik.
- Zaelani, M., & Fadlan, M. N. (2023). The events of Friday Ta'addud in the text of *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah*: A historical review. *Litteratura*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/ltr.v2i1.30500>